solvetax

Informasi bulanan

Agustus 2023

solutions for your tax

Konsultasi pajak SolveTax StB Dipl.-Bw (FH) Sascha Schneider

> Schwindstraße 2 63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404

E-mail: mail@solvetax.de

www.solvetax.de

Selamat datang,

Pengadilan Fiskal Münster memutuskan bahwa bantuan Corona yang dibayarkan pada tahun 2020 bukan merupakan pendapatan luar biasa yang hanya dapat dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah untuk tujuan pajak penghasilan.

Pada tahun 2022, 22 juta orang di Jerman menerima manfaat sekitar 363 miliar Euro dari pensiun negara, swasta atau perusahaan. Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Statistik Federal, sekitar dua pertiga (66,4%) manfaat pensiun merupakan penghasilan kena pajak.

Dalam keputusan lain, Pengadilan Pajak Münster mengomentari apakah laporan penilaian yang diperoleh oleh wajib pajak di mana sisa masa manfaat properti sewa dihitung sesuai dengan Ordonansi Nilai Properti dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan penyusutan.

Pengadilan Fiskal Federal Jerman (Bundesfinanzhof) menangani pertanyaan mengenai apa yang disebut investasi kapal dan mengklarifikasi apakah gagal bayar dari pinjaman pemegang saham atau klaim dari kemitraan diam dalam konteks penghentian operasi kemitraan bersama tercakup dalam efek penyelesaian.

Tidak ada insentif bagi pemberi kerja jika karyawan sementara diberikan makanan kantin secara gratis oleh pemberi kerja sebagai bagian dari pengaturan katering komunal dan pemberi kerja tidak membayar kepada pemberi pinjaman untuk penyediaan makanan tersebut. Ini adalah keputusan Pengadilan Pajak Lower Saxony.

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau tentang topik lainnya? Silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Untuk pembayar pajak penghasilan

Bantuan Corona yang diterima tidak dikenakan pengurangan pajak penghasilan sebagai penghasilan luar biasa

Seorang pemilik tunggal menjalankan perusahaan komersial yang mencakup restoran dan hotel. Pada tahun 2020, ia diberikan bantuan darurat sebesar 15.000 euro, bantuan penghubung I sebesar 6.806 euro dan "bantuan November/Desember" sebesar 42.448 euro karena pembatasan terkait pandemi. Kantor pajak tergugat mengenakan bantuan Corona yang diterima dengan pajak penghasilan standar. Pemilik tunggal mengklaim, antara lain, bahwa bantuan Corona dapat dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Bantuan tersebut merupakan kompensasi atas pendapatan yang hilang atau hilang atau atas tidak berjalannya aktivitas karena penutupan operasi bisnis akibat pandemi.

Pengadilan Fiskal Münster menolak gugatan tersebut karena, menurut pendapatnya, pertanyaan apakah hibah tersebut merupakan kompensasi atas pendapatan yang hilang atau yang akan hilang atau kompensasi atas pengabaian atau tidak dilakukannya suatu kegiatan tidak relevan dalam konteks ini. Ini bukan masalah pendapatan luar biasa. Pada tahun yang disengketakan, penggugat hanya mengakui bantuan Corona sebagai pendapatan, yang juga terkait dengan tahun kalender tersebut. Bantuan Corona juga tidak dimaksudkan untuk diperpanjang untuk periode penilaian lebih lanjut, juga tidak diterima dalam periode penilaian selain yang dibayarkan, dan dalam periode penilaian ini bertepatan dengan pendapatan reguler penggugat dari operasi bisnisnya.

Catatan

Keputusan tersebut bersifat final. Banding tidak diizinkan, karena prinsip-prinsip mengenai elemen agregasi telah diklarifikasi oleh hukum kasus.

Dua pertiga dari manfaat pensiun dikenakan pajak penghasilan pada tahun 2022

Pada tahun 2022, 22 juta orang di Jerman menerima manfaat sekitar 363 miliar Euro dari pensiun negara, swasta atau perusahaan. Sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Statistik Federal, sekitar dua pertiga (66,4%) tunjangan pensiun merupakan penghasilan kena pajak. Sejak tahun 2015, tarif pajak rata-rata telah meningkat sebesar 11 poin persentase. Alasan kenaikan ini adalah peraturan baru tentang perpajakan

pendapatan pensiun dalam "Undang-Undang Pendapatan Pensiun" tahun 2005. Elemen inti dari peraturan baru ini adalah transisi dari hulu ke hilir perpajakan pensiun wajib pada tahun 2040. Berdasarkan hal ini, biaya untuk penyediaan pensiun pada fase tabungan secara bertahap akan dibebaskan dari pajak dan hanya manfaat pada fase pembayaran yang akan dikenakan pajak. Proporsi pendapatan pensiun yang kena pajak tergantung pada tahun dimulainya pensiun: semakin lama pensiun dimulai, semakin tinggi proporsi pendapatan pensiun yang kena pajak. Selain itu, bagian yang dikenakan pajak juga meningkat karena kenaikan pensiun, karena ini sepenuhnya dikenakan pajak.

Bagi banyak pensiunan, bagian kena pajak dari pensiun mereka berada di bawah tunjangan dasar setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang relevan. Dalam hal ini, banyak pensiun yang tetap bebas pajak jika tidak ada penghasilan lain. Hampir 84% penerima pensiun yang dikenai pajak - termasuk pasangan yang masih hidup dan anak-anak - memiliki penghasilan lain selain pensiun mereka, seperti pembayaran pensiun, pendapatan kerja, atau pendapatan sewa. Dalam kasus pasangan menikah yang dinilai secara bersama-sama, ini juga bisa menjadi pendapatan pasangan, yang ditambahkan bersama untuk tujuan perpajakan.

Penentuan penyusutan berdasarkan penilaian nilai dengan perhitungan sisa masa manfaat properti sewa sesuai dengan Peraturan Nilai Real Estat Jerman (Immobilienwertverordnung)

Pengadilan Fiskal Münster telah memutuskan bahwa terserah pada wajib pajak untuk menunjukkan dan, jika perlu, membuktikan **masa manfaat aktual yang lebih pendek untuk real estat dalam** kasus-kasus individual. Penilaian keadaan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini kemudian menjadi tanggung jawab pengadilan fiskal sebagai contoh fakta dalam tindakan tersebut.

Dengan latar belakang ini, pengajuan pendapat ahli tentang substansi bangunan, khususnya penentuan kondisi real estat dengan bantuan yang disebut metode ERAB (metode untuk menentukan keausan bahan bangunan), bukan merupakan prasyarat dari pihak wajib pajak untuk pengakuan masa manfaat aktual yang diperpendek. Oleh karena itu, jika wajib pajak atau ahli yang ditugaskan oleh wajib pajak memilih metode pembuktian yang berbeda untuk alasan yang dapat dipahami, ini dapat menjadi dasar untuk perkiraan masa manfaat aktual yang dipersingkat yang



diperlukan dalam kasus individu, sejauh kesimpulan dapat diambil dari metode yang dipilih mengenai faktor-faktor penentu yang akan ditentukan. Karena hanya probabilitas tertinggi dari masa manfaat aktual yang lebih pendek yang dapat diperlukan dalam konteks estimasi, penyempitan metodologi pendapat ahli atau spesifikasi metode penentuan tertentu akan melampaui persyaratan beban pembuktian.

Prosedur untuk menentukan nilai riil bangunan juga dapat diterapkan. Bahkan jika model yang berlaku untuk memperoleh sisa masa manfaat ekonomis untuk bangunan tempat tinggal, dengan mempertimbangkan modernisasi, tidak terutama ditujukan untuk menentukan masa manfaat yang sebenarnya, model seperti itu dapat sesuai untuk membentuk keyakinan yang dapat diandalkan tentang dasar estimasi yang akan diterapkan dalam kasus individual. Tidak ada pembenaran untuk menyimpang dari prinsip kesetaraan metode penilaian (hukum bangunan) karena alasan hukum pajak.

Partisipasi kapal: Pengurangan kerugian dari partisipasi diam saat menentukan keuntungan menurut tonase

Di hadapan Pengadilan Fiskal Federal, muncul pertanyaan apakah mitra terbatas dari perusahaan pelayaran yang berpartisipasi sebagai mitra diam pada saat yang sama dan menghitung laba mereka berdasarkan tonase dapat mengurangi kerugian (sebagian) dari kontribusi diam mereka sebagai biaya operasi khusus dalam proses likuidasi perusahaan, atau apakah ini merupakan komponen dari laba penyerahan yang di-kompensasikan dengan laba tonase.

Menurut BFH, jika mitra terbatas dari KG (kemitraan terbatas), yang pada saat yang sama memegang kepentingan kemitraan diam-diam yang khas di perusahaan ini atau telah memberikan pinjaman kepada perusahaan ini, gagal membayar sebagian kontribusi kemitraan diam-diam mereka atau klaim pinjaman dalam konteks penghentian operasi kemitraan, kerugian yang diakibatkannya akan menjadi bagian dari pendapatan dan akan dikompensasikan dengan laba yang ditentukan.

Bujukan pemberi kerja dalam hal makanan kantin gratis untuk karyawan sementara

Menurut pendapat Pengadilan Fiskal Lower Saxony, tidak ada insentif bagi pemberi kerja jika karyawan sementara diberikan makanan kantin secara gratis oleh pemberi kerja sebagai bagian dari pengaturan katering komunal dan pemberi kerja tidak membayar kepada pemberi pinjaman untuk penyediaan makanan tersebut.

Pemberi kerja bertanggung jawab atas pajak upah yang harus dipotong dan dibayarkannya dari upah untuk rekening karyawan setiap kali upah dibayarkan. Tanggung jawab ada, antara lain, jika upah diperlakukan sebagai bebas pajak tanpa memenuhi persyaratan untuk pembebasan pajak. Dalam kasus ini, penggugat tidak berkewajiban untuk memotong pajak gaji untuk tunjangan biaya makan tambahan yang dibayarkan kepada karyawannya untuk penugasan di luar negeri dan mengirimkannya kepada tergugat. Tunjangan untuk biaya makan tambahan yang dibayarkan oleh penggugat kepada karyawannya adalah bebas pajak. Tunjangan yang diterima oleh karyawan di luar sektor publik dari pemberi kerja mereka untuk penggantian biaya perjalanan, biaya relokasi atau biaya tambahan jika terjadi rumah tangga ganda adalah bebas pajak selama tidak melebihi biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya yang terkait dengan pendapatan. Biaya perjalanan juga termasuk biaya makan tambahan.

Pengeluaran untuk "Makanan di atas roda" bukan merupakan pengeluaran luar biasa

Pengadilan Fiskal Münster mengomentari perlakuan biaya untuk "makanan di atas roda" sebagai biaya luar biasa.

Mungkin benar bahwa penggugat dan istrinya, yang telah meninggal sementara itu, bergantung pada pengiriman makan siang yang disengketakan karena sakit. Namun, secara umum, biaya-biaya tersebut bukanlah hal yang luar biasa dan tidak dapat dihindari jika tidak dikeluarkan secara langsung untuk tujuan penyembuhan, tetapi kadang-kadang dikeluarkan sebagai biaya konsekuensial dari suatu penyakit. Pertimbangan dasar atas biaya tidak langsung dari suatu penyakit akan mengarah pada pertimbangan pajak yang tidak dapat dibenarkan atas biaya hidup, yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Standar yang ketat harus diterapkan ketika menilai apakah biaya hidup dapat dipertimbangkan untuk tujuan perpajakan melalui pengecualian.



Untuk satu hal, penggunaan layanan pesan antar makanan sekarang tersebar luas di seluruh populasi. Dengan latar belakang ini saja, biaya-biaya ini juga harus dialokasi-

kan untuk kehidupan umum dan tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, penyiapan makanan sebagai kegiatan sehari-hari ditanggung oleh tunjangan sekaligus



untuk penyandang disabilitas.

Untuk pembayar pajak warisan

Setelah kematian pewaris, renovasi besar-besaran rumah keluarga - Dimaksudkan untuk tujuan hunian sendiri?

Para pihak mempermasalahkan pemberian keringanan pajak atas rumah semi terpisah yang ditempati oleh almarhum sendiri hingga kematiannya. Penggugat adalah ahli waris tunggal dari ayahnya, yang meninggal pada tahun 2013. Warisan tersebut termasuk rumah semi-terpisah, yang ditempati oleh ayahnya sendiri sampai kematiannya. Penggugat telah tinggal di rumah semi-terpisah yang bersebelahan langsung dengan rumah tersebut bersama keluarganya sejak tahun 1981. Setelah kematian pewaris, penggugat menghubungkan rumah-rumah semi-terpisah tersebut secara struktural dan kadaster menjadi satu unit. Setelah menyelesaikan pekerjaan pemugaran dan renovasi ekstensif, yang sebagian dilakukan oleh penggugat sendiri, ia telah menggunakan rumah-rumah semi-terpisah yang terhubung dengan cara ini sebagai satu apartemen sejak Agustus 2016.

Menurut Pengadilan Fiskal Münster, pembebasan pajak berdasarkan Pasal 13 (1) No. 4c Undang-Undang Pajak Warisan juga dapat mencakup akuisisi apartemen yang terletak di sebidang tanah yang sedang dikembangkan jika secara spasial bersebelahan dengan apartemen yang telah digunakan oleh pihak pengakuisisi dan kedua apartemen tersebut digabungkan menjadi satu apartemen yang dihuni oleh pemilik setelah akuisisi. Mengenai batasan ruang tamu, menurut katakata standar, yang hanya didasarkan pada ukuran rumah keluarga yang diakuisisi, yang penting ukuran apartemen yang diakuisisi tidak melebihi 200 meter persegi. Total ruang hidup apartemen yang tercipta karena koneksi tidak menentukan.

Sebuah hunian dimaksudkan untuk digunakan sendiri untuk tujuan huniannya sendiri jika pembeli **berniat untuk** menggunakan hunian tersebut untuk tujuan huniannya **sendiri** dan melaksanakan niat tersebut. Pembeli harus menunjuk apartemen "**segera**", yaitu tanpa keraguan yang dapat disalahkan, untuk digunakan sendiri untuk tujuan hunian mereka sendiri. Pembeli berkewajiban untuk mempromosikan pekerjaan renovasi dan menghilangkan cacat dalam hal waktu sedemikian rupa sehingga tidak ada penundaan yang dianggap tidak masuk akal menurut pandangan pasar. Namun, upaya yang tidak proporsional untuk mempercepat waktu tidak diperlukan. Sebaliknya,

sudah cukup jika pembeli mengambil semua tindakan yang wajar. Pembeli tidak dapat disalahkan atas keterlambatan pindah karena pekerjaan renovasi jika dia menugaskan pekerjaan tanpa penundaan, tetapi pengrajin yang ditugaskan tidak dapat melakukannya pada waktu yang tepat karena alasan yang tidak menjadi tanggung jawab pembeli. Indikasi lain dari peruntukan langsung untuk digunakan sendiri adalah pembersihan atau pembersihan apartemen yang diperoleh dengan segera. Pengadilan yakin bahwa penggugat dalam kasus yang disengketakan telah segera menetapkan rumah semi-terpisah yang diperolehnya untuk digunakan sendiri untuk keperluan tempat tinggalnya.

Untuk pembayar pajak bisnis

Penambahan pajak perdagangan atas jasa di bawah perjanjian sponsor

Penggugat, yang menjalankan bisnis grosir, adalah sponsor utama sebuah klub olahraga. Pada tahun yang disengketakan, 2015, perusahaan tersebut membelanjakan sejumlah uang dan, sebagai imbalannya, diizinkan untuk menggunakan logo klub olahraga tersebut untuk tujuan periklanan, antara lain, berdasarkan perjanjian sponsor untuk musim 2014/2015 dan 2015/2016. Selain itu, mereka juga diberikan hak untuk beriklan di kaus dan pakaian lainnya serta iklan perimeter. Sejak musim 2015/2016, penggugat memiliki akses ke ruang iklan di lantai. Biaya desain dan produksi yang dikeluarkan untuk tindakan periklanan ditanggung oleh penggugat. Kantor pajak tergugat mengalokasikan estimasi biaya untuk periklanan perimeter (termasuk iklan di layar presentasi LED dan ruang iklan lantai) dan iklan jersey ke ketentuan tambahan berdasarkan § 8 No. 1 huruf d GewStG (penyewaan aset bergerak) dan biaya untuk materi visual (pengalihan logo klub untuk tujuan periklanan) ke ketentuan penambahan berdasarkan § 8 No. 1 huruf f GewStG (pengalihan hak sementara).

Pengadilan Fiskal Federal menolak penambahan pajak perdagangan. Perjanjian sponsor yang disengketakan adalah kontrak yang berdiri sendiri ("sui generis") dengan kewajiban kinerja yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan Fiskal Federal tidak mengakui adanya elemen-elemen penting yang dapat dipisahkan dari perjanjian sewa, sewa guna usaha, atau pengalihan hak, melainkan "satu kesatuan yang seragam dan tak terpisahkan".

Pajak upah

Peraturan tentang perhatian yang tidak kena pajak disesuaikan

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Bundesrat menyetujui Pedoman Pajak Upah 2023. Pedoman tersebut telah direvisi secara mendasar dalam versi yang baru. Pedoman pajak upah yang telah diubah dan diperbarui (LStR 2023) kini telah berlaku sejak 01.01.2023.

Terdapat pembatasan yang signifikan terhadap peraturan tentang tunjangan **bebas pajak upah.** R 19.6 paragraf. 1 ayat 2 LStR 2023 membatasi hal ini mulai tahun 2023 untuk karyawan dan kerabat mereka yang tinggal di rumah yang sama. Ini berarti bahwa hadiah hingga nilai **60 euro** hanya bebas pajak jika diberikan untuk kepentingan karyawan atau kerabat yang tinggal di rumah tangga yang sama dengan karyawan. Misalnya, hadiah pernikahan dari pemberi kerja kepada anak yang tidak tinggal di rumah tangga karyawan tidak termasuk dalam pembebasan pajak.

Catatan

Perhatian adalah tunjangan dari pemberi kerja yang, dalam hal sifat dan nilainya, sesuai dengan hadiah yang biasanya dipertukarkan dalam hubungan sosial dan tidak mengarah pada pengayaan yang signifikan bagi karyawan. Ini termasuk hadiah sesekali dalam bentuk barang (misalnya bunga, makanan mewah, buku/perangkat suara, dll.) hingga nilai 60 euro. Tunjangan moneter selalu merupakan bagian dari upah - meskipun nilainya rendah.

Hubungan kerja yang seragam dalam kasus Pekerjaan di dua perusahaan - pajak upah flat-rate tidak memungkinkan

Persyaratan untuk asumsi pekerjaan bervolume rendah harus dinilai secara eksklusif sesuai dengan standar hukum asuransi sosial. Hal ini sejalan dengan maksud pembuat undang-undang, yang secara tegas meniadakan batas upah kena pajak independen untuk pembayaran sekaligus. Dengan demikian, aturan lump sum pajak terkait dengan aturan hukum asuransi sosial, yang, menurut gagasan pembuat undang-undang, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan antara perlakuan upah dari hubungan kerja marjinal di bawah hukum iuran dan hukum pajak.

Menurut Pengadilan Fiskal Berlin-Brandenburg, tidak mungkin untuk bekerja untuk pemberi kerja yang sama dalam pekerjaan kecil yang tidak tunduk pada asuransi wajib serta dalam pekerjaan kecil yang tidak tunduk pada asuransi wajib (karena kurangnya agregasi). Sebaliknya, pembayaran upah harus dijumlahkan jika berasal dari pemberi kerja yang sama, meskipun hubungan kerja terstruktur secara berbeda.

Lainnya

Pajak penarikan

Banyak orang mempertimbangkan untuk meninggalkan Republik Federal Jerman, dilihat dari pernyataan Ketua Dewan Pakar Ekonomi Jerman. Sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Implementasi ATAD, yang harus dipatuhi oleh wajib pajak yang ingin beremigrasi sejak 1 Januari 2022, penghapusan aturan penangguhan jika pindah ke negara Uni Eropa atau EEA telah diperkenalkan sebagai pengetatan yang paling serius. Akibatnya, sekarang ada risiko perpajakan atas "pendapatan kering", yaitu kemungkinan pembayaran pajak yang berlebihan tanpa aliran masuk likuiditas.

Solusi alternatif: Pajak keluar dapat dihapuskan secara retrospektif jika kewajiban pajak tidak terbatas ditetapkan kembali dalam jangka waktu tertentu (tujuh tahun).

Pengadilan Fiskal Münster telah muncul sebagai perusak, karena memutuskan pada 31.10.2019 bahwa satu-satunya kepulangan tidak cukup. Juga harus dibuktikan secara kredibel bahwa niat untuk kembali ke Jerman sudah ada pada saat keberangkatan. Selain itu, pajak keberangkatan tidak berhenti berlaku jika ini (emigrasi) gagal atau dibatalkan. Pajak keluar hanya berhenti berlaku surut jika penghentian kewajiban pajak tak terbatas didasarkan pada ketidakhadiran yang hanya bersifat sementara dan dimaksudkan sejak awal

Keputusan yang sangat buruk bagi warga negara yang terkena pajak!

Perubahan haluan/penyelamatan yang menguntungkan wajib pajak terjadi melalui keputusan revisi Pengadilan Fiskal Federal. Pengadilan Fiskal Federal menganggap karakteristik "hanya ketidakhadiran sementara" yang mengarah pada penghapusan pajak keberangkatan - terlepas dari niat untuk kembali - terpenuhi jika wajib pajak kembali menjadi subjek kewajiban pajak tak terbatas dalam kerangka waktu yang ditentukan secara hukum, saat ini tujuh tahun setelah keberangkatan .



Tanggal Pajak/Jaminan Sosial

Agustus/September 2023

Jenis kontrol		Kedewasaan	
Pajak upah, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		10.08.2023 ¹	11.09.2023 ¹
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		tidak berlaku	11.09.2023
Pajak penghasilan perusahaan, biaya tambahan solidaritas		tidak berlaku	11.09.2023
Pajak penjualan		10.08.2023 ²	11.09.2023³
Akhir masa tenggang jenis pajak di atas ketika dibayar oleh:	Transfer bank ⁴	14.08.2023	14.09.2023
	Periksa ⁵	10.08.2023	11.09.2023
Pajak perdagangan		15.08.2023 ⁶	tidak berlaku
Pajak properti		15.08.2023 ⁶	tidak berlaku
Akhir masa tenggang jenis pajak di atas ketika dibayar oleh:	Transfer bank⁴	18.08.2023	tidak berlaku
	Periksa ⁵	15.08.2023	tidak berlaku
Jaminan sosial ⁷		29.08.2023	27.09.2023
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas harus dibayarkan ke kantor pajak yang bertanggung jawab pada saat yang sama ketika distribusi keun- tungan dilakukan kepada pemegang saham.	

- 1 Selama sebulan terakhir.
- 2 Untuk bulan terakhir, untuk bulan kedua dari belakang dalam hal perpanjangan permanen, untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan dengan perpanjangan permanen.
- 3 Selama satu bulan terakhir, dalam kasus perpanjangan permanen untuk bulan kedua dari belakang.
- 4 Biasanya, pengembalian PPN di muka dan pengembalian pajak upah harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Pengiriman uang harus dilakukan lebih awal sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sama dengan tanggal jatuh tempo.
- 5 Jika pembayaran dilakukan dengan cek, perlu dicatat bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan sampai tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebetan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- 6 Di negara bagian dan wilayah di mana tanggal 15 Agustus 2023 merupakan hari libur nasional (Hari Asumsi), pajak jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2023.
- 1 luran jaminan sosial secara seragam jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir di bulan berjalan. Untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran, disarankan untuk menggunakan prosedur debit langsung. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu yang seragam untuk penyerahan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 25.08.2023/25.09.2023, dalam setiap kasus pada tengah malam). Keunikan regional sehubungan dengan tanggal jatuh tempo mungkin harus dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh agen eksternal, data penggajian harus dikirim ke agen sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.

Jejak

Konten dibuat dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai representasi lengkap dan tidak menggantikan pemeriksaan dan konsultasi dalam kasus-kasus individual. Artikel dan ilustrasi **yang** terdapat di sini dilindungi oleh hak cipta.